

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan bercorak sentralistik menjadi sistem pemerintahan desentralistik merupakan akibat dari bergulirnya era reformasi. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan lahirnya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat sendiri atas pemerataan dan keadilan sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah otonomi masing-masing.

Pada tataran yang lebih kecil, perubahan tersebut berdampak pada system pemerintahan kecamatan dan desa. Pada tingkat kecamatan tidak lagi menjalankan urusan-urusan dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah. Urusan-urusan tersebut sudah menjadi wewenang bagi pemerintah desa dalam melaksanakan, mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di berbagai bidang, dengan begitu pemerintahan desa menjadi kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu negara, meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (*urban bias*). Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan mengalami kemerosotan. Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi

semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Tim Pengelola Kegiatan atau disingkat TPK merupakan unsur penting dalam menyukseskan Pembangunan desa. Kapasitas TPK yang profesional, jujur dan akuntabel dalam mewujudkan pembangunan desa diharapkan bisa menjadi faktor penting dalam kemajuan desa.

Permasalahannya dalam kegiatan pembangunan desa ditemukan banyak kelemahan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang didanai oleh Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Dengan Mekanisme Swakelola Dan Padat Karya, seperti dalam pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan desain gambar masih menggunakan jasa pihak ketiga. Dalam pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan dilapangan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu peningkatan kapasitas Tim Pengelola Kegiatan pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting demi memberikan kontribusi signifikan bagi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Desa, untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Termasuk kemampuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TPK.

Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dengan kondisi di lokasi penelitian yang direncanakan di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, pengamatan awal peneliti, menunjukkan bahwa kapasitas Tim Pengelola Kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya hasilnya masih belum sesuai atau belum terlaksana secara optimal.

Minimnya pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa secara baik dapat mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak optimal. Hal itu terjadi dikarenakan berbagai factor salah satunya. dikarenakan faktor kemampuan sumber daya Tim Pengelola Kegiatan. Kapasitas yang masih rendah merupakan

bagian permasalahan yang dijumpai dilapangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Pengembangan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember).

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengembangan Kapasitas Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa khususnya di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan kapasitas tim pengelola kegiatan pembangunan desa di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang kajian manajemen pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pengembangan kapasitas tim pelaksana kegiatan program pembangunan desa.
2. Memberikan strategi dan evaluasi pengembangan kapasitas tim pelaksana kegiatan program pembangunan desa.